

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia internasional akhir-akhir ini telah diguncang dengan adanya pengembangan nuklir di Kawasan Asia Timur yang dilancarkan oleh Korea Utara, kasus tersebut telah menarik perhatian dunia terutama mengancam negara-negara kawasan. Serangkaian uji coba rudal nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2010 di Kawasan Asia Timur mengancam keamanan negara-negara di sekitarnya, terutama Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut secara geografis memiliki jarak yang sangat dekat dengan Korea Utara, dengan hal ini kedua negara tersebut merasa terancam akan keselamatan negara dan masyarakat di dalamnya¹.

Ambisi Korea Utara akan pengembangan persenjataan nuklir bermula saat mereka melakukan pembiayaan tambang uranium, yang terdapat empat juta ton biji uranium dan kemudian mendorong Korea Utara untuk dalam mengembangkan program nuklir. Selain itu dikarenakan eratnya hubungan mereka dengan Uni Soviet rela memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Uni Soviet memberikan bantuan berupa pelatihan pembuatan nuklir, meskipun tidak secara terang-terangan dalam membantu Pyongyang membangun program nuklir, akan tetapi Uni Soviet memberikan akses teknologi dasar yang diperlukan dalam membuat dan memisahkan plutonium. Uni Soviet memberikan reactor riset *IRT-*

¹ Chung. Esther "Japan-ROK Relations: Do They Always Get Better with North Korean Provocations?". *Stanford Journal of East Asian Affairs* Vol 15. (2015). hal 79.

2M yang dipasang di pusat penelitian Yongbyeon yang menjadi tahapan awal pembangunan program nuklir Korea Utara.

Kerhasilan dalam memodernisasi reactor riset *IRT-2M* telah membuat Korea Utara mencapai teknologi nuklir tercanggihnya dalam penyulingan, konversi dan produksi, dalam memnuhi standar negara-negara maju². Karena keberhasilan pengembangan nuklir Korea Utara akhirnya tertangkap mata dunia internasional yang membuat mereka secara terpaksa menandatangani perjanjian dengan Badan Energi dan Atom Internasional, serta karena desakan dari Amerika Serikat dan negara di seluruh dunia yang pada akhirnya membuat Korea Utara secara terpaksa menandatangani perjanjian *Non-Proliferation Treaty*, dimana semua anggota yang bergabung diharuskan melakukan proses denuklirisasi, sebagai perwujudan penghapusan kepemilikan senjata nuklir. Akibat tekanan bertubi-tubi yang pada akhirnya membuat Korea Utara mengundurkan diri dari perjanjian NPT, mundurnya Korea Utara pada perjanjian ini akan sangat berbahaya terhadap kestabilan kawasan Asia timur.

Dengan adanya ancaman tersebut membuat Korea Selatan dan Jepang memiliki pandangan yang sama untuk meminimalisir ancaman dengan menjalin kerjasama khusus di bidang militer. Jika ancaman ini terus berlanjut dan Korea Utara tetap melakukan proliferasi nuklir, maka akan dapat mengganggu bahkan membahayakan stabilitas dan keamanan regional dan internasional³. Dengan dibentuknya perjanjian

² Mazaarr, Michael J. 1995. North Korea and the Bomb: A Case Study in Nonproliferation. London: Macmillan Press.

³ Mayor Pnb Taufik Nur Cahyanto, ST. Pengaruh Konflik di Semenanjung Korea Terhadap Kondisi Perekonomian, Pertahanan dan Keamanan NKRI. KERIS: Lembaga Kajian Pertahanan Strategis. 2013. Diakses melalui <https://lembagakeris.net/pengaruh-konflik-di-semenanjung-korea-terhadap-kondisi-perekonomian-pertahanan-dan-keamanan-nkri/> (5 Februari 2023).

ini tidak akan memunculkan saling kecurigaan bahwa suatu Negara berusaha menahan informasi tertentu dari Negara lain, selain itu upaya kolaboratif ini membuka peluang bagi Korea Selatan untuk mengakses informasi intelijen berharga yang dikumpulkan oleh satelit Jepang, dan diskusi yang sedang berlangsung seputar perjanjian GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang telah dipengaruhi oleh meningkatnya ancaman militer Korea Utara.

Adanya provokasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara membuat Jepang trauma akan kehancuran negaranya pada Perang Dunia ke-2. Hal inilah yang membuat Jepang menguatkan tekadnya untuk menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Korea Selatan dan melakukan kerjasama di bidang militer. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Kwan-Jin dan Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa Pada tanggal 10 Januari 2011 diadakan perjamuan makan malam untuk membahas Kerjasama di Bidang Keamanan yang tertuang dalam *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* yang membahas tentang pertukaran informasi mengenai perkembangan nuklir Korea Utara. Perjanjian ini dibuat sebagai respon pertahanan yang efektif terhadap ancaman militer yang semakin meningkat dari Korea Utara terkait aktivitas nuklirnya.

Kerjasama GSOMIA seharusnya disepakati pada tahun 2012 namun tertunda, kerjasama bilateral tersebut mengatur bagaimana Jepang dan Korea Selatan saling berbagi dan memiliki intelijen militer yang berkaitan dengan informasi nuklir dari Korea Utara. Keputusan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemimpin negara ditinjau dari berbagai aspek termasuk pemerintah dan opini publik di dalamnya untuk menyetujui *General Security of Military Information Agreement*

(GSOMIA). Penundaan perjanjian tersebut dikarenakan adanya pemberontakan dari publik Korea Selatan yang tidak setuju dengan adanya perjanjian tersebut karena faktor sejarah yang masih terasa hingga saat ini mengenai isu sensitif mengenai mengenai perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer kolonial Jepang terhadap wanita Korea Selatan pada masa Perang Dunia II, pada saat itu isu tersebut dikenal dengan sebutan "*Comfort Woman*". Selain itu, sengketa pulau Dokdo/Takeshima antara Jepang dengan Korea Selatan juga menjadi gambaran dinamika hubungan bilateral kedua negara⁴.

Pakta *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) berhasil disepakati pada tanggal 23 November 2016 oleh kedua negara. Isi dari perjanjian tersebut memungkinkan Jepang dan Korea Selatan untuk saling berbagi informasi intelijen terkait perkembangan nuklir di Korea Utara yang saat itu dipegang oleh presiden Korea Selatan Park Geun Hye dan Jepang oleh Presiden Shinzo Abe. Perjanjian tersebut diperpanjang setiap tahunnya, selama durasi perjanjian kedua negara melakukan 29 kali pertukaran informasi. Keputusan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing negara melibatkan pertimbangan kekuatan dalam sistem internasional, jaringan saling ketergantungan negara, dinamika politik global, dan lainnya dapat dibuktikan dengan dampak yang dihasilkan dari perjanjian GSOMIA, yaitu memberikan dampak yang baik bagi dinamika hubungan bilateral kedua negara. Melihat proses pembuatan kerjasama yang cukup rumit, nampaknya sulit bagi Jepang dan Korea Selatan untuk melakukan kerjasama bilateral khususnya di

⁴ Jaehan Park dan Yun Sangyoung. "Korea and Japan's Military Information Agreement: A Final Touch for The Pivot?". Diakses dari <http://thediplomat.com/2016/11/korea-and-japans-militaryinformation-agreement-a-final-touch-for-the-pivot/> pada 21 April 2017.

bidang militer, hal tersebut dikarenakan banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh masing-masing negara, terutama pada sejarah masa lalu yang menjadi sentimen publik.

Persetujuan Pertukaran Informasi Militer Rahasia Antar Negara atau *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* mengacu pada perjanjian saling izin pertukaran informasi yang bersifat rahasia mengenai kebijakan militer antara dua negara. Jenis perjanjian ini memiliki tujuan untuk mendorong kerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan, termasuk dalam menghadapi situasi ancaman bersama seperti potensi ancaman militer, aktivitas terorisme, dan penyebaran senjata. Perjanjian Pertukaran Informasi Militer Rahasia Antar Negara (GSOMIA) memiliki signifikansinya yang memungkinkan Korea Selatan dan Jepang untuk bertukar informasi intelijen militer terkait ancaman bersama, baik dalam konteks ancaman regional maupun global. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi kedua negara dalam mengenali serta mengantisipasi potensi ancaman terhadap aspek keamanan di tingkat nasional maupun regional.

Tambahan pula, GSOMIA juga memiliki peran dalam mencegah penyebaran senjata pemusnah massal beserta teknologinya. Pertukaran informasi yang rahasia ini memberikan manfaat dalam mendeteksi serta menghambat upaya penyelundupan atau penyebaran senjata serta teknologi terkait yang melanggar hukum. Kolaborasi dalam bidang militer antara negara-negara mitra pun dapat ditingkatkan melalui GSOMIA, termasuk kerja sama dalam pelatihan, pelaksanaan latihan militer bersama, dan pengembangan strategi pertahanan. Dikarenakan posisi geografis yang berdekatan, Korea Selatan dan Jepang menjalin kolaborasi melalui

GSOMIA dalam aspek geopolitik. Walaupun terdapat perbedaan dalam sejarah dan pandangan politik, Jepang dan Korea Selatan tetap memiliki tujuan bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Asia Timur. Kedua negara menghadapi ancaman yang serupa, seperti dari Korea Utara dan perubahan dalam situasi keamanan regional. Meskipun sejarah membawa perbedaan, langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat kerja sama regional antara Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain di wilayah tersebut, terutama dalam bidang kerja sama ekonomi, lingkungan, serta keamanan.

Pemerintah kedua negara melihat bahwa permasalahan "Comfort Woman", Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima merupakan hambatan yang dapat membahayakan kerjasama GSOMIA, maka kedua belah pihak terus melakukan upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya penyelesaian dalam kasus *Comfort Women*, dengan terbentuknya perjanjian *Kono Statement*, *Asian Women's Fund*, dan *Japan-ROK on Comfort Women 2015* sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh kedua negara. Selain itu dalam penyelesaian sengketa pulau Dokdo/Takeshima dilakukan negosiasi serta pengajuan permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional sebagai badan hukum internasional yang sering menyelesaikan sengketa antara negara anggota PBB. Dan dalam permasalahan Perang Dagang upaya yang dilakukan oleh kedua negara adalah dengan meminta bantuan kepada WTO dan AS⁵.

Kebijakan-kebijakan yang di usung dan dijalankan oleh para presiden Korea

⁵ Rich, Motoko dan Wong, Edward. Under U.S. Pressure, South Korea Stays in Intelligence Pact With Japan. Diambil dari <https://www.nytimes.com/2019/11/22/world/asia/japan-south-koreaintelligence.html>. Diakses pada 19 Juli 2023

Selatan juga menjadi respon terhadap ancaman nuklir Korea Utara dan konflik militer antar negara. Selain itu Korea Selatan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Jepang saat bergabung dalam kerjasama GSOMIA, Jepang dianggap sebagai mitra strategis karena mereka melakukan perubahan dasar kebijakan militer, besarnya anggaran militernya, kelengkapan serta kecanggihan peralatan militer yang menjadi aset pengawasan dan deteksi berkualitas. Jepang meningkatkan kekuatan intelejen lewat akses informasi yang diperoleh melalui *Signals Intelejence* dan *Electronic Intelejence* sebagai keperluan intelijen dan sistem peringatan dini, dan Jepang memiliki enam *Aegis Combat System* yang merupakan sistem anti rudal untuk kapal perang yang termasuk dalam teknologi intelejen Jepang dan dapat membantu Korea Selatan dalam menghadapi ancaman agresi Korea Utara yang kian meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan persenjataan nuklir oleh Korea Utara menarik perhatian global, khususnya di Asia Timur. Serangkaian uji coba rudal nuklir mereka mengancam stabilitas negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan. Dalam menghadapi ancaman ini, kedua negara tersebut bekerjasama melalui General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) untuk berbagi intelijen terkait informasi nuklir dari Korea Utara.

Kerjasama ini tidak hanya mengurangi kecurigaan antarnegara terkait menyembunyikan informasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Korea

Selatan untuk mengakses informasi intelijen berharga dari Jepang. Diskusi mengenai GSOMIA dipengaruhi oleh meningkatnya ancaman militer Korea Utara. Perjanjian ini ditujukan sebagai respons pertahanan efektif terhadap ancaman semakin meningkat dari Korea Utara terkait aktivitas nuklirnya.

Rencana kesepakatan GSOMIA pada 2012 mengalami penundaan karena perlawanan di Korea Selatan terkait sejarah perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa Perang Dunia II, yang masih menjadi isu sensitif. Sengketa mengenai pulau Dokdo/Takeshima juga mencerminkan dinamika dalam hubungan bilateral kedua negara.

Dalam hal ini, rumusan masalah pokok untuk penelitian dengan judul “Kepentingan Nasional Korea Selatan Dalam Kerjasama General Security Of Military Information Agreement (GSOMIA) Dengan Jepang Tahun 2016 – 2019” Dapat diidentifikasi berdasarkan pada latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepentingan Nasional Korea Selatan Dalam Kerjasama GSOMIA?

Dengan rumusan masalah pokok ini, peneliti dapat fokus pada analisis pada implementasi kerjasama GSOMIA dan pencapaian kepentingan nasional korea selatan dalam kerjasama GSOMIA.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin diungkap oleh peneliti:

1.3.1 Untuk mengetahui kerangka kerjasama GSOMIA.

1.3.2 Untuk mengetahui pencapaian kepentingan nasional Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA dengan Jepang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan pasti ada tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Keunggulan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan kepustakaan mengenai topik yang terkait dengan kerjasama militer GSOMIA. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat membantu bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.4.2 Keunggulan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa dan masyarakat dalam memahami pakta kerjasama intelejen militer GSOMIA antara Korea Selatan dengan Jepang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah yang akan penulis buat ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, tetapi masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan juga saling melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mana merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang kemudian dituangkan ke dalam konteks yang jelas dan juga padat. Maka dari itu, deskripsi karya tulis diawali dengan latar belakang masalah mengenai apa saja yang menjadi alasan memilih judul, lalu adapun rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang mencakup penjelasan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, serta perbandingannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek, dimensi dan parameter.

Bab keempat, berisi bahasan penelitian, hasil temuan peneliti yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis melalui sub-bab untuk menjadi pendukung dalam menjawab rumusan masalah.

Bab lima, berisi analisis hasil penelitian yang akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

Bab enam, sebagai bab akhir yang memuat kesimpulan yang diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian yang ditemukan. Sehingga pembaca dapat memahami isu terkait dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian di masa mendatang.

